

Manfaatkan Secara Produktif Dakel

SALATIGA (KR) - Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit meminta agar dana kelurahan (dakel) sebesar Rp 19 miliar untuk 23 kelurahan di Salatiga pada alokasi 2021 bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan produk unggulan masing-masing kelurahan di Salatiga. Hal itu dikemukakan pada saat reses ke III 2020 Ketua DPRD Salatiga, ketika bertemu dengan seluruh kepala kelurahan dan LPMK di Salatiga untuk menyerap aspirasi mengenai pengelolaan dana kelurahan tersebut. "Dana kelurahan harus dikelola sebaik-baiknya dan sesuai sasaran. Saya berharap dana kelurahan bisa produktif, menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha unggulan, tandas Dance Ishak Palit, Sabtu (14/11) lalu.

Dalam mengelola strategi dana kelurahan ini juga dihadirkan tokoh desa wisata, yakni Kepala Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Junaidi Mulyono. Ia menjelaskan mengenai mengelola desanya menjadi maju dan mandiri, kuncinya adalah perencanaan yang tuntas dan big data yang kuat. Lurah Cebongan Kecamatan Argomulyo Salatiga, Sururi pada reses ini langsung curhat mengenai kebijakan yang terkadang tidak memihak pada pemerintahan bawah di Salatiga, yakni kelurahan. (Sus)

Ikan Segar dan Olahan Tekan Stunting

KEBUMEN (KR) - Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz melakukan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kampanye ini sekaligus upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kebumen yang masih 19,2% di tahun 2019. "Kasus stunting di Kabupaten Kebumen memerlukan perhatian serta penanganan serius dan terpadu dari semua stakeholder karena di tahun 2019, masih 19,2 persen atau sekitar 10.291 balita stunting dari total balita 53.083 yang sudah terdata," terang Yazid saat kampanye Gemarikan di Pendapa Kecamatan Sruweng, Senin (16/11).

Tahun 2020, fokus penanganan kasus stunting ada di 10 desa, 3 desa di antaranya di Kecamatan Sruweng, yakni Desa Pangempon, Condongcatur, dan Sidoagung. Dengan kampanye Gemarikan, diharapkan meningkatkan angka konsumsi ikan untuk menurunkan angka stunting. Apalagi angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kebumen di tahun 2019 masih 22,13 kg/kapita/tahun. Angka itu diakui masih lebih rendah dari angka konsumsi ikan Provinsi Jateng dan nasional. Karena itu Pemkab Kebumen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, secara rutin memberi bantuan ikan bagi rumah tangga miskin yang memiliki ibu hamil dan balita. Pada 2020, telah disalurkan bantuan ikan segar dan ikan olahan kepada 1.375 RTM. (Suk)

BPR BKK Purworejo Butuh Tenaga Kontrak

PURWOREJO (KR) - Guna memenuhi kebutuhan pegawai, PT BPR BKK Kabupaten Purworejo melakukan seleksi tenaga kontrak untuk 52 formasi yang dibutuhkan. Ke 52 formasi itu terdiri dari marketing 30 orang, teller 15 orang, TI 2 orang, pengalaman kantor 2 orang, driver 2 orang, dan cleaning service 1 orang. "Total pendaftar sebanyak 939 orang, setelah melalui seleksi administrasi dan psikotes, tersisa 111 orang yang masih harus melaksanakan wawancara," kata Kabag Perekonomian Setda Purworejo Dra Titik Mintarsih MPd, Selasa (17/11). Di sela-sela memantau jalannya seleksi Dra Titik Mintarsih mengatakan, bahwa saat ini PT BPR BKK mengalami kekurangan pegawai.

"Harapan kami setelah menerima pegawai, BKK akan semakin eksis dan sehat karena didukung oleh sumber daya manusia atau pegawai yang berkualitas dan memadai sesuai dengan bidangnya," katanya. Menurutnya, PT BPR BKK Purworejo memiliki andil yang besar dalam pembangunan Kabupaten Purworejo. "Dengan kecukupan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan bisa memberikan kontribusi PAD pada Pemkab Purworejo," tambahnya. Selain itu, dengan adanya pegawai baru diharap PT BPR BKK akan mampu membangun kepercayaan masyarakat. "Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Purworejo bahkan merambah ke kabupaten lain, diharapkan BKK semakin sehat dan maju," katanya seraya menambahkan, bahwa proses rekrutmen sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu CV Hadidaya Semarang. (Nar)

Setiap Operasi 200 Orang Terjaring

PURWOREJO (KR) - Kesadaran masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) demi menjaga penyebaran virus korona dinilai semakin rendah. Bahkan masih banyak masyarakat berada di tempat terbuka tidak mengenakan masker. "Setiap kali kami menggelar operasi yustisi, terjaring sedikitnya 200 orang melakukan pelanggaran tidak mengenakan masker," kata Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito SIK SH MSi, Selasa (17/11).

Di sela-sela silaturahmi Polres Purworejo dengan wartawan di Aula Mapolres setempat Kapolres Rizal Marito menandakan bahwa pihaknya tidak akan bosan membantu masyarakat dengan terus mengingatkan akan bahaya virus korona dan selalu mengingatkan untuk memenuhi protokol kesehatan. "Sampai saat ini kami juga tidak akan mengeluarkan izin keramaian, kecuali sekadar pemberitahuan," tandasnya.

Kapolres mengakui, belakangan mulai ada keinginan sebagian masyarakat untuk mengadakan kegiatan keramaian. "Ada orang atau kelompok tertentu yang berupaya untuk menggelar kegiatan keramaian tapi kami tetap tidak memberi izin," tambahnya. (Nar)



KR-Gunarwan

Kapolres AKBP Rizal Marito SIK SH MSi saat bersilaturahmi dengan wartawan.

Ketua Dewan Akan Kawal Penyiapan Pasar Sementara



DPRD KAB.KENDAL

KENDAL (KR) - Pasar Weleri, Kabupaten Kendal yang terbakar pada Jumat (13/11) lalu, menyisakan kepedihan bagi ratusan pedagang yang setiap hari berjualan. Usai pasar terbakar hingga 90 persen, para pedagang bingung akan berjualan di mana.

Perwakilan pedagang pun akhirnya mendatangi kantor DPRD Kendal, Senin (15/11) untuk mengadukan nasib mereka kepada wakil rakyat.

Pedagang Pasar Weleri mendesak agar pemerintah Kabupaten Kendal segera menyediakan tempat untuk

relokasi sementara untuk para pedagang. Mereka minta pasar darurat segera disiapkan agar pedagang bisa berjualan kembali untuk mempertahankan hidup mereka.

Perwakilan pedagang yang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kendal adalah pengurus paguyuban pedagang Pasar Weleri. Kedatangannya ke gedung DPRD Kendal untuk meminta wakil rakyat memperhatikan nasib pedagang.

Pedagang meminta anggota dewan bisa mendesak Pemda Kendal untuk menyiapkan lokasi sementara bagi pedagang untuk berjualan. Pasalnya pedagang kesulitan untuk berdagang di bekas lokasi kebakaran karena tidak diperbolehkan.

Ketua Paguyuban Pasar Weleri, Warno mengatakan, pedagang hanya minta segera disiapkan lokasi untuk pedagang beraktivitas seperti biasanya. Pedagang minta relokasi tidak terlalu jauh dari pasar lama dan

diberikan tempat yang layak.

Kehadiran perwakilan pedagang Pasar Weleri diterima jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, dan berjanji untuk mengakomodir masukan dan permintaan dari pedagang. Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, pedagang minta kepada pemerintah Kendal untuk menyiapkan pasar sementara.

"Kami akan mengawal penyiapan pasar sementara

agar pedagang pasar weleri bisa kembali berdagang dan roda perekonomian kembali berjalan kembali. Kami minta agar perwakilan pedagang atau pengurus paguyuban segera mengirim surat ke Bupati agar segera memproses pembangunan pasar sementara," ujar Muhammad Makmun.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kendal, Yanuar Fatoni menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan dua lokasi untuk peda-

gang sementara berjualan, yaitu di pasar Weleri dua dan eks terminal weleri yang berada di depan pasar lama yang terbakar.

Dinas perdagangan juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menanyakan kondisi pasar yang tidak ikut terbakar. Ternyata dinas terkait tersebut menyimpulkan bangunan pasar yang tidak terbakar tidak aman jika masih digunakan untuk berjualan. (Ung)



KR-Unggul Priambodo

Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun (kanan) saat memberikan semangat kepada para perwakilan pedagang weleri.

Diskusi Soal UMK, Ganjar Pranowo Temui Buruh

SEMARANG (KR) - Sejumlah perwakilan serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mendatangi rumah dinas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (16/11) malam.

Mereka menemui Ganjar Pranowo untuk diskusi dan memberikan masukan terkait dasar hukum penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 mendatang. Usai menemui perwakilan buruh, Ganjar Pranowo menyampaikan pertemuan yang digelar lesehan itu berlangsung santai namun hangat.

Menurut Ketua KSPN Jateng Nanang Setyono, pertemuan dengan Ganjar Pranowo terkait dengan pengupahan, tetapi KSPN tidak menuntut berapa upah buruh harus dinaikkan, melainkan lebih pada memberikan masukan dan pertimbangan hukum yang harus

diperhatikan Gubernur dalam penetapan UMK tahun depan.

Menurut Nanang, situasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena pandemi Covid-19, peraturan perundang-undangan tentang penetapan upah juga tumpang tindih. Persoalan upah diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Selain itu, ada pula PP 78 tahun 2015 yang menjadi turunannya.

"Tapi baru-baru ini, ada juga UU Cipta Kerja yang juga mengatur soal pengupahan. Maka nanti pak Gubernur mau pakai yang mana. Kami datang untuk sharing dan memberikan masukan

untuk menjadi bahan pertimbangan Gubernur," ujar Nanang.

Secara hukum, UU Cipta Kerja memang sudah disahkan dan bisa menjadi acuan penetapan UMK 2021, tetapi dalam undang-undang itu, khususnya soal pengupahan dijelaskan, bahwa soal pengupahan akan diatur secara rinci menggunakan peraturan pemerintah (PP). Sedangkan PP-nya sampai saat ini belum ada. Dengan demikian, KSPN menilai paling tepat Gubernur menggunakan UU 13 dan PP 78.

Ganjar Pranowo mengapresiasi KSPN yang dengan bagus menyampaikan masukan-masukannya. Tidak harus demo, namun dengan dialog semuanya bisa disampaikan. "Saya kira bagus, mereka memberikan masukan. Mereka menyampaikan bagaimana

nanti kami saat memutuskan UMK, regulasi yang dirujuk yang mana. Saya kira, apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah sama dengan kami," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga mengapresiasi sikap buruh yang tidak memaksakan kehendak dalam penetapan UMK 2021. Mereka juga memahami situasi dan kondisi perusahaan. Cara komunikasi seperti ini yang dilakukan, dan Apindo bisa ikut, maka hasilnya pasti lebih bagus. Sudah ada 34 Kabupaten/Kota di Jateng yang telah menyetorkan pengajuan UMK 2021. Hanya Kabupaten Kebumen yang belum menyetorkan sampai saat ini. Dari jumlah tersebut, ada 10 kabupaten/kota yang antara Apindo dan buruh bisa sepakat. (Bdi)

Unnes Gelar Pameran Kartun Respons Covid-19

SEMARANG (KR) - Semarang International Cartoon Festival (SICAR-FEST) #1 2020 digelar secara virtual Universitas Negeri Semarang (Unnes) mulai Senin (16/11). Pameran kartun yang mengedukasi respons terhadap Covid-19 diikuti 33 negara, selain Indonesia adalah Cuba, Iran, Saudi Arabia, Turki, Amerika, Rumania, Rusia, India, Malaysia, Filipina, Belgia,

Brasil, Serbia, China, Colombia, Prancis, Bosnia Herzegovina, Denmark, Spanyol, Estonia, Italia, Algeria, Inggris, Cyprus, Dominican Republic, Ukraina, dan Slovakia.

Lembaga Prestasi Indonesia (Leprid) menganugrahi Prestasi dan Rekor kepada pihak penyelenggara sebagai bentuk apresiasi dengan tujuan dapat memotivasi berbagai pihak agar me-

ngembangkan kreativitas meski dalam kondisi Pandemi Covid-19. Paulus Pangka SH, Ketua Umum sekaligus pendiri Leprid mengungkapkan Unnes khususnya Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) memiliki ide inovatif dan kreatif mengemas edukasi respons Covid-19 melalui pameran kartun tingkat dunia.

"Bayangkan berbagai macam negara menjadi peserta hanya dengan mengandalkan teknologi virtual yang dikemas seolah pameran dalam sebuah galeri nyata. Yang menarik adalah konten kartun umumnya memberikan pencerahan dan ajakan untuk menyelamatkan diri dari bahaya Covid-19, dari bagaimana pentingnya bermasker, hidup bersih dan sehat, hingga menjaga jarak," ujar Paulus Pangka SH. (Cha)



KR-Chandira AN

Paulus Pangka SH (kiri) menyerahkan tropi penghargaan Leprid kepada perwakilan Unnes.

Debat Perdana Tanpa Pendukung Paslon

KLATEN (KR) - Debat pasangan calon (paslon) bupati dan calon wakil bupati Klaten sesi pertama yang akan berlangsung di Al Hakim Convention Hall, Jumat (20/11) mendatang, hanya dihadiri internal KPU, Bawaslu, dan tim kampanye dengan jumlah terbatas. Selain itu, paslon juga tidak diperbolehkan membawa pendukung, meskipun di luar gedung.

"Yang ada di ruangan nanti hanya paslon 6 orang, 12 orang tim sukses paslon, 5 orang dari KPU dan 2 orang dari Bawaslu dan panelis. Sedangkan pers diberikan kesempatan memotret pada awal acara dan di akhir acara saja," kata Komisioner KPU Klaten, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Samsul Huda, Senin (16/11).

Pilkada Klaten 2020 akan diikuti tiga paslon, yakni paslon nomor urut 1 Sri Mulyani-Yoga Hardaya (Mulyo), nomor urut 2 One Krisnata-Muhammad Fajri (ORI), dan nomor urut 3 Arif Budiyo-Harjanta (ABY-HJT).

Samsul Huda menjelaskan, kesiapan untuk penyelenggaraan debat paslon tersebut sudah mencapai 90 persen. Semula KPU menghendaki dilakukan gladi bersih siang hari, namun paslon keberatan dan meminta sore hari.

"Debat akan dimulai pukul 19.30, namun semua paslon sudah hadir pukul 17.00 WIB untuk gladi bersih," jelas Samsul Huda. Terkait materi debat, Samsul Huda mengemukakan, tidak ikut campur, dan diserahkan sepenuhnya pada tim panelis. Para panelis sudah menandatangani pakta integritas, untuk menjamin kerahasiaan pertanyaan. (Sit)

Jumlah Pengungsi Merapi Terus Bertambah

BOYOLALI (KR) - Semakin meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, bertambah pula kewaspadaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III. Ada beberapa wilayah Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Selo yang masuk ke dalam KRB III yakni Desa Klakah, Jarakah, dan Tlogolele. Sebagai langkah mengantisipasi aktivitas gunung yang berstatus siaga ini, maka masyarakat di KRB III mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pengungsi Desa Klakah sejumlah 176 orang telah mengungsi ke Tempat Penampungan Pengungsi Sementara (TPPS) desa setempat. Warga yang mengungsi berasal dari Dusun Sumber yang berjarak hanya 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi dan Dusun Bakalan yang berjarak 3,5 hingga 4 kilometer. "Sementara ini yang ki-

ta tempatkan di TPPS adalah balita, lansia dan ibu hamil," ungkap Kepala Desa Klakah, Marwoto saat ditemui di TPPS desa setempat pada, Selasa (17/11).

Di tempat terpisah, tepatnya di TPPS Desa Tlogolele juga telah digunakan oleh 277 warga untuk mengungsi. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena informasi terkini dari perkembangan Gunung Merapi.

"Kemarin ada sosialisasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) terkait Merapi terkini, maka mungkin hal itu juga akan menambah kesiapsiagaan masyarakat," terang Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tlogolele, Naigen Achta Nur Edi Saputra.

Desa Tlogolele memiliki empat dusun yang berjarak cukup dekat dengan puncak Gunung Merapi.

Antara lain ada Dusun Stabelan yang berjarak 3 kilometer, Dusun Takeran yang berjarak 4 kilome-

ter, Dusun Belang dan Gumuk yang berjarak 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi. (*-1)



KR-Mulyawan

Suasana Pengungsian di Desa Klakah.